

Efisiensi Perizinan dan Digitalisasi Logistik sebagai Strategi Politik Anggaran untuk Meningkatkan PAD Banten

Dea Prastiwi Maharani¹, Nadindra Safa², Riswanda³

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: pratiwidea45@gmail.com, Nadindrasafa1@gmail.com, riswanda@untirta.ac.id

Abstract

The efficiency of digital-based licensing through the Sipeka application and the digitalization of the logistics sector are positioned as regional budget policy strategies to encourage increased Regional Original Income (PAD) in Banten Province. The discussion was conducted through a literature review of relevant scientific journals, regulations, and policy documents. The study results indicate that the implementation of digital licensing increases transparency and accelerates service delivery, but its effectiveness is still hampered by technical system issues, human resource capacity, and low digital literacy among some business actors. Logistics digitalization contributes to increasing distribution efficiency, reducing logistics costs, and strengthening regional economic activity, despite still facing limitations in infrastructure and system integration. The synergistic integration of digital licensing efficiency and logistics digitalization has the potential to expand the regional tax and levy base and strengthen regional fiscal capacity if supported by integrated budget allocation and governance.

Keywords

Regional Original Income, licensing efficiency, logistics digitalization, budget policy, Banten Province.

Abstrak

Efisiensi perizinan berbasis digital melalui aplikasi Sipeka dan digitalisasi sektor logistik diposisikan sebagai strategi politik anggaran daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan perizinan digital meningkatkan transparansi dan percepatan pelayanan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh masalah teknis sistem, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Digitalisasi logistik berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi distribusi, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem. Integrasi sinergis antara efisiensi perizinan digital dan digitalisasi logistik berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah apabila didukung oleh alokasi anggaran dan tata kelola yang terintegrasi.

Kata kunci

Pendapatan Asli Daerah, efisiensi perizinan, digitalisasi logistik, politik anggaran, Provinsi Banten.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah,

serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat PAD yang optimal mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Provinsi Banten, aktivitas industri menjadi kontributor utama PAD dan memegang peranan

strategis dalam pembiayaan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Yakup & Haryanto, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah.

Dalam konteks perkembangan terkini, Pemerintah Provinsi Banten telah mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi, khususnya melalui digitalisasi pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mengimplementasikan aplikasi daring Sipeka untuk memfasilitasi pengurusan perizinan secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur, memangkas rantai birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses layanan perizinan. Namun, implementasi Sipeka masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya waktu pemrosesan izin, kesalahan dalam pencetakan dokumen, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan pelaku usaha (Sylvia Maulani, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sistem digital belum secara otomatis menjamin efisiensi perizinan, sehingga berpotensi menghambat kemudahan berusaha, investasi, dan pada akhirnya optimalisasi PAD.

Dinamika di sektor logistik memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah dan peningkatan PAD. Digitalisasi logistik, khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi, memungkinkan proses bisnis berlangsung lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Penerapan teknologi digital dalam sektor ini dapat

mempercepat pengiriman barang, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan daya saing industri dan wilayah (Raza et al., 2020). Bagi Provinsi Banten yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri dan jalur utama perdagangan, digitalisasi logistik berpotensi memperluas aktivitas ekonomi, memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta mendorong peningkatan PAD. Namun demikian, implementasi digitalisasi logistik masih dihadapkan pada tantangan berupa kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan, serta lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan efisiensi perizinan berbasis digital melalui aplikasi Sipeka dengan digitalisasi sektor logistik sebagai dua instrumen kebijakan yang saling melengkapi dalam meningkatkan PAD Provinsi Banten. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas digitalisasi perizinan atau logistik secara parsial, artikel ini memosisikan keduanya sebagai bagian dari satu ekosistem digital yang memengaruhi iklim investasi, kinerja industri, dan kapasitas fiskal daerah. Pendekatan ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya sinergi kebijakan digital lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, artikel ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) sejauh mana efisiensi perizinan melalui aplikasi Sipeka berkontribusi terhadap peningkatan potensi PAD Provinsi Banten; (2) bagaimana peran digitalisasi logistik dalam memperkuat basis ekonomi daerah sebagai sumber PAD; dan (3)

bagaimana desain integrasi kebijakan digital di sektor perizinan dan logistik yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan. Secara konseptual, artikel ini berangkat dari hipotesis bahwa peningkatan efisiensi perizinan berbasis sistem digital, apabila didukung oleh digitalisasi logistik yang memadai, akan mempercepat proses usaha dan investasi, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan PAD Provinsi Banten.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara efisiensi perizinan digital dan digitalisasi logistik terhadap peningkatan PAD di Provinsi Banten, mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terkait integrasi transformasi digital di bidang perizinan dan logistik guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur (literature review) yang melibatkan pengumpulan, analisis, serta sintesis dari berbagai sumber literatur relevan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren penelitian sebelumnya, celah pengetahuan, dan pembangunan kerangka teoretis yang kokoh terkait efisiensi perizinan, digitalisasi logistik, serta politik anggaran untuk peningkatan PAD di Provinsi Banten. Sumber literatur mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan regulasi terkini, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah serta studi kasus aplikasi Sipeka DPMPTSP Banten.

Hasil dan Pembahasan

1. Anggaran Politik Daerah

Anggaran merupakan suatu komponen yang sangat utama untuk melaksanakan suatu program atau rencana yang telah dirancang atau diagendakan terlebih dahulu (Yuliyanto et al., 2022). Menurut Fauzan dalam Purwanti Purwanti et al., (2025), anggaran adalah alat penting bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian jangka pendek secara efektif. Politik daerah pada dasarnya merupakan proses politik yang menyertai perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Politik anggaran mencerminkan pilihan strategis pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal yang terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aktor dalam politik anggaran daerah mencakup pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan, DPRD sebagai lembaga legislatif dan pengawas serta aktor eksternal, seperti pelaku usaha dan masyarakat yang secara tidak langsung membentuk arah kebijakan. Dinamika antar-aktor ini memengaruhi penentuan prioritas pengalokasian anggaran, termasuk investasi pada reformasi perizinan dan pengembangan logistik digital. Kebijakan tersebut menunjukkan peran anggaran sebagai sarana perencanaan dan distribusi sumber daya guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Politik anggaran berkaitan erat dengan mutu pelayanan publik, sebab pengalokasian dana menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bagi masyarakat. Efisiensi perizinan serta digitalisasi logistik berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, percepatan

kegiatan bisnis dan pengurangan biaya ekonomi. Oleh karena itu di Provinsi Banten, politik anggaran tidak hanya mendanai pembangunan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menyempurnakan tata kelola pelayanan publik dan memajukan PAD secara berkelanjutan.

2. Kondisi Perizinan di Provinsi Banten

Kondisi perizinan di Provinsi Banten mencakup berbagai bentuk perizinan pemerintahan, seperti perizinan pembangunan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perizinan administratif lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual, sistem perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan kepentingan umum. Menurut Dwiyanto (2018) bahwa perizinan pemerintah tidak hanya bertujuan mengatur aktivitas masyarakat, tetapi juga memastikan terpenuhinya standar pelayanan, kepastian hukum, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas sistem perizinan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja birokrasi daerah.

Dalam praktiknya, permasalahan birokrasi perizinan masih banyak ditemukan, terutama terkait kompleksitas prosedur, panjangnya rantai pelayanan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta kebijakan reformasi birokrasi nasional. Selain itu, keterbatasan sumber daya

manusia dan perbedaan interpretasi regulasi teknis turut memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan di daerah.

Permasalahan perizinan berdampak langsung terhadap iklim investasi dan pelaksanaan pembangunan daerah. Proses perizinan yang tidak efisien dapat menunda realisasi kegiatan pembangunan dan investasi, baik di sektor ekonomi maupun pelayanan sosial. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena keterlambatan aktivitas ekonomi akan memengaruhi realisasi pajak daerah, retribusi perizinan, serta penerimaan daerah lainnya. Oleh karena itu, perbaikan sistem perizinan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal.

3. Digitalisasi Logistik di Provinsi Banten

Kondisi sistem logistik di Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah mengingat posisinya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara dan pintu gerbang distribusi nasional melalui pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan transportasi darat. Menurut Erwin Raza et al., (2020) Transformasi ke arah digitalisasi adalah proses yang sedang berlangsung di industri logistik. Sistem logistik daerah mencakup pengelolaan arus barang, pergudangan, transportasi, serta distribusi antarwilayah yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia jasa logistik.

Pengelolaan logistik di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem, efisiensi

distribusi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Pada kenyataannya membangun digitalisasi logistik bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak yang ada dalam rantai pasokan untuk saling bekerja bersama dalam mewujudkannya (Raza et al., 2020). Hambatan utama dalam sistem logistik dan distribusi di Provinsi Banten antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, tingginya biaya logistik, serta belum optimalnya koordinasi antarwilayah dan antarpelaku rantai pasok. Proses distribusi barang sering kali terkendala oleh kemacetan, ketidakseimbangan arus barang, serta keterbatasan data yang akurat dan *real time*. Selain itu, masih dominannya sistem logistik konvensional menyebabkan rendahnya efisiensi waktu dan biaya, yang berdampak pada meningkatnya beban distribusi bagi pelaku usaha dan masyarakat.

4. Efisiensi Perizinan sebagai Strategi Politik Anggaran

Efisiensi perizinan merupakan bagian dari strategi politik anggaran daerah yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, anggaran tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan rutin, tetapi juga sebagai alat politik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan. Dengan perizinan pemerintah dapat mengontrol segala perbuatan masyarakat dan diharapkan dapat terwujud suatu keseimbangan dalam hidup bernegara (Ismiyanto, 2023). Penetapan reformasi perizinan sebagai prioritas anggaran mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

dan menciptakan iklim kebijakan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.

Prioritas anggaran untuk reformasi perizinan diwujudkan melalui pembiayaan program penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk perizinan, harus memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Selain itu, penguatan digitalisasi perizinan juga sejalan dengan arah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Digitalisasi Logistik sebagai Strategi Politik Anggaran

Digitalisasi logistik merupakan bagian dari strategi politik anggaran daerah yang menempatkan penguatan sistem distribusi dan konektivitas ekonomi sebagai prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, anggaran daerah digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat daya saing ekonomi wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.

Alokasi anggaran untuk penguatan logistik diarahkan pada pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur pendukung, pengembangan sistem informasi logistik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Integrasi sistem logistik digital menjadi fokus utama, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pemantauan distribusi barang secara real time. Kontribusi digitalisasi logistik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat tidak langsung namun strategis. Sistem logistik yang efisien mendorong kelancaran aktivitas perdagangan, industri, dan jasa, sehingga mempercepat perputaran ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut memperluas basis pajak dan retribusi daerah, baik dari sektor perdagangan, transportasi, maupun jasa logistik.

6. Integrasi Sinergis antara Efisiensi Perizinan dan Digitalisasi Logistik

Integrasi sinergis antara efisiensi perizinan dan digitalisasi logistik dapat dimaknai sebagai keterpaduan kebijakan, sistem, dan proses yang menghubungkan layanan perizinan usaha yang cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum dengan pengelolaan rantai pasok berbasis teknologi digital. Keterpaduan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam konteks Provinsi Banten, efisiensi perizinan yang diimplementasikan melalui aplikasi Sipeka berperan sebagai pintu masuk utama bagi kegiatan investasi dan industri, sementara digitalisasi logistik menyediakan dukungan sistemik berupa pengelolaan arus barang yang lebih cepat, terukur, dan efisien dari sisi biaya. Oleh karena itu, integrasi tidak dipahami sekadar sebagai keberadaan dua

kebijakan digital yang berjalan secara paralel, melainkan sebagai keterhubungan data, proses, dan pengambilan keputusan anggaran, sehingga percepatan perizinan dapat segera dikonversi menjadi peningkatan aktivitas logistik dan pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Efektivitas integrasi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Menurut Maulani dan Setiawan (2024) menunjukkan bahwa implementasi Sipeka di Provinsi Banten belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi perizinan yang optimal akibat masih ditemukannya kendala seperti lamanya waktu pemrosesan izin, kesalahan pencetakan dokumen, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan reformasi perizinan digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem teknologi, tetapi juga pada kapasitas pengguna, kualitas tata kelola, serta efektivitas sosialisasi kebijakan. Dalam konteks integrasi lintas sektor, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi perizinan perlu didukung oleh kesiapan ekosistem digital lainnya, termasuk sektor logistik, agar manfaat percepatan perizinan dapat dirasakan secara nyata oleh dunia usaha. Di sisi lain, berbagai kajian mengenai digitalisasi logistik di Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kompleksitas birokrasi antarperusahaan, serta menekan biaya distribusi melalui transparansi dan sistem pelacakan secara real time.

Digitalisasi logistik berkontribusi dalam meningkatkan kepastian waktu

distribusi dan akurasi data, sehingga memperkuat daya saing pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan serta industri. Kondisi ini berpotensi memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Berdasarkan temuan tersebut, integrasi efisiensi perizinan melalui Sipeka dengan sistem logistik digital dapat dipahami sebagai satu ekosistem pelayanan publik dan rantai pasok yang saling terhubung, di mana percepatan perizinan menciptakan kepastian usaha dan digitalisasi logistik menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan intensitas aktivitas ekonomi. Dengan demikian, integrasi keduanya dapat diposisikan sebagai strategi politik anggaran yang saling memperkuat dalam mendorong kemandirian fiskal dan daya saing wilayah Provinsi Banten melalui alokasi anggaran yang terintegrasi bagi reformasi perizinan dan penguatan sistem logistik digital.

Kesimpulan

PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal serta pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten. Efisiensi perizinan berbasis digital melalui aplikasi Sipeka menjadi instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi. Meskipun demikian, implementasi perizinan digital di Provinsi Banten belum sepenuhnya berjalan optimal akibat masih adanya kendala teknis sistem, keterbatasan kapasitas aparatur, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dampaknya terhadap peningkatan PAD belum maksimal.

Di sisi lain, digitalisasi logistik memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan efisiensi distribusi, penurunan biaya logistik, dan penguatan daya saing wilayah. Walaupun kontribusinya terhadap PAD bersifat tidak langsung, penguatan sistem logistik digital mampu memperluas basis pajak dan retribusi daerah melalui meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa. Namun demikian, penerapan digitalisasi logistik di Provinsi Banten masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, belum optimalnya integrasi sistem, serta lemahnya koordinasi antaraktor dalam rantai pasok.

Oleh karena itu, integrasi sinergis antara efisiensi perizinan digital dan digitalisasi logistik perlu diposisikan sebagai satu kesatuan strategi politik anggaran daerah. Dukungan alokasi anggaran yang terarah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama agar percepatan perizinan dapat dikonversi menjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital di sektor perizinan dan logistik tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal dan daya saing pembangunan Provinsi Banten.

Referensi

- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. In *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Ismiyanto, I. (2023). Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(01), 1–6. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i01>. 591
- Purwanti Purwanti, Talul Alkhandari, Indah Ayu Angraeni, & Shafa Naswa Intinsa. (2025). Penggunaan Analisis Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Keuangan dalam Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 657–665. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4692>
- Raza, E., Sabaruddin, L. O., & Komala, A. L. (2020). Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(1), 49–63.
- Sylvia Maulani, T. S. (2024). *Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem*. 15, 10–24.
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., Umami, R., Piksi, P., Indonesia, G., & Tengah, J. (2022). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis*. 6(2), 456–468.